

Konflik Internal Pasca Pemilu 2007 di Kenya (*Internal Conflict Post 2007's Election in Kenya*)

Ghesta Syavenatra Yohantin, Drs. Supriyadi, M.Si, Dr. Puji Wahono, M.Si
Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Kenya merupakan salah satu negara di Afrika bagian timur yang cukup sering dilanda konflik sejak masa kemerdekaan. Salah satu konflik yang terjadi dalam adalah konflik pasca pemilu 2007. Konflik tersebut berawal dari pengumuman hasil pemilu yang dilaksanakan pada 27 Desember 2007 yang menetapkan Mwai Kibaki, yang merupakan presiden Kenya 2002-2007, sebagai pemenang. Sedangkan pihak oposisi, Raila Odinga, menyatakan bahwa hasil pemilu telah dicurangi. Ketegangan atas sengketa hasil pemilu tersebut terus memuncak dan berujung pada kekerasan. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode analisa deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan cara berfikir deduktif untuk menganalisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pasca pemilu 2007 di Kenya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu: 1) faktor politik, yang ditandai dengan adanya persaingan antar kelompok dan pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam; 2) faktor ekonomi, yang ditandai dengan adanya masalah ekonomi; 3) faktor sosial budaya, yang ditandai dengan sejarah kelompok yang bermasalah.

Kata Kunci: Kenya, konflik, pasca pemilu.

Abstract

Kenya has been riddled with conflict and violence throughout its history as a nation. The post 2007's election conflict in Kenya is a major conflict that occurred in a short time. Post 2007's election conflict start from the announcement of the election held on December 27, 2007 which set Mwai Kibaki, which is the president of Kenya in 2002-2007, as the winner. As for the opposition, Raila Odinga, said that the election results had been rigged. Tensions over disputed election lead to violence. Data analysis methods used in writing this paper is descriptive-qualitative method of analysis. The authors use a deductive way of thinking to analyze the data. The results showed that the post-election conflict in Kenya in 2007 caused by three factors: 1) political factors, which are characterized by the presence of inter-group competition and more intense combat leadership, 2) economic factors, characterized by economic problems, 3) socio-cultural factors, which are characterized by the troubled history of the group.

Keywords: Kenya, conflict, post election.

Pendahuluan

Kenya merupakan negara paling demokratis di Afrika. Meskipun demikian, Kenya sering dilanda konflik, salah satu konfliknya adalah konflik pasca pemilu 2007. Konflik pasca pemilu 2007 yang meluas di Kenya berawal dari pemilu presiden 27 Desember 2007 yang berlangsung kacau dan tak sesuai standar internasional. Sejak hasil pemilihan umum (pemilu) yang digelar 27 Desember 2007 menetapkan kembali Mwai Kibaki sebagai Presiden Kenya, persengketaan di negeri ini terus memanas. Dalam pemilu 2007, dua partai, ODM (*Orange Democratic Movement*) dan PNU (*Party of National Unity*), berlomba-lomba untuk duduk di kursi pemerintahan. Kedua partai tersebut didukung oleh etnis dari daerah masing-masing pihak berasal. ODM didukung oleh Luo, Luhya dan Kalenjin, di

Nyanza, West dan Rift Valley. PNU di dukung oleh Kikuyu, di Central, East, Nairobi, Coast dan Rift Valley.

Masing-masing pihak mengklaim sebagai pemenang dalam pemilu, yang menurut kalangan pengamat diwarnai kecurangan dari kedua pihak. Raila Odinga, kandidat dari oposisi, berpendapat bahwa pemilu tidak berjalan jujur dan adil. Sebab menurut kubu Odinga, seharusnya Raila Odinga-lah yang tampil sebagai pemenang, jika saja mereka tak dicurangi pihak Kibaki. Sementara kubu Mwai Kibaki menyatakan sah jadi pemenang. Semula kubu oposisi Riala Odinga disebut memenangi pemilu dengan keunggulan suara tipis. Namun, tiga hari setelah pemilu, Komisi Pemilu Kenya menyatakan, Presiden Mwai Kibaki menang atas pemimpin oposisi Raila Odinga. Odinga menyampaikan protes dan meminta Kibaki mundur. Hal ini menimbulkan ketegangan yang memuncak pada kerusuhan dan kekerasan. Ternyata, hampir semua pengamat lokal dan internasional menyatakan

hasil pemilu presiden Kenya tersebut memang tidak sah. Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan yang berada di Kenya untuk menengahi konflik tersebut mengatakan kekerasan yang terjadi dipicu oleh pemilu yang tidak jujur dan adil.[1]

Sejak pertikaian tentang hasil pemilu tersebut gelombang kekerasan merebak, bentrokan antar-kelompok tak terhindarkan yang telah menewaskan sekitar 1.000 orang dan memaksa 250.000 warga mengungsi.[2] Bentrokan dan pertikaian terus berlangsung di kawasan kumuh ibukota Nairobi serta di kota Mombasa, Naivasha, Kisumu, Eldoret, Kakamega dan daerah lain di Kenya tengah dan barat. Bentrokan itu adalah rentetan dari pemilihan presiden yang hasilnya dipersengketakan.

Konsekuensi dari kekerasan pasca pemilu 2007 di Kenya menurut menteri keuangan Kenya, Amos Kimunya, adalah Kenya kehilangan pendapatan pajak sebesar Ksh 60 miliar (885,000,000 US Dollar) dan pendapatan harian hingga sebesar Ksh 2 miliar (29 juta US Dollar).[3] Biaya transportasi yang meningkat juga mempengaruhi industri susu, yang menderita kerugian yang luar biasa karena susu yang dikirimkan ke daerah lain mengalami pembusukan akibat pemblokiran jalan. Kentang, tomat dan buah markisa juga bisa tidak disampaikan secara tepat waktu kepada para pembeli. Panen jagung pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 3 juta ton. Namun karena kerusuhan politik, panen tersebut berkurang menjadi 15% dari perkiraan awal. Industri bunga diperkirakan mengalami kerugian hingga Ksh 1 miliar (14,5 juta US dollar). Hasil panen yang buruk dan perpindahan mayoritas warga yang akan melakukan panen semakin memperburuk krisis ekonomi Kenya akibat konflik pasca pemilu 2007.[4]

Konflik juga menghancurkan industri pariwisata Kenya. Ribuan turis membatalkan kunjungannya karena khawatir menjadi korban kerusuhan. Akibatnya, Kenya berpotensi kehilangan pemasukan dari sektor pariwisata sebesar 900 juta dollar AS yang biasa mereka terima setiap tahunnya. Secara keseluruhan, kata sejumlah pejabat, konflik berdarah di Kenya mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar 1 miliar dollar AS. Selain itu, konflik mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi.[5]

Rakyat dari dua kelompok pemimpin yang sedang bersaing sering terlibat bentrok yang mengakibatkan puluhan, ratusan, bahkan kini seribu nyawa telah melayang. Selain tewas bergelimpangan di tempat terbuka, rumah-rumah mereka pun tak luput dari kehancuran dan pembakaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor pemicu konflik pasca pemilu 2007 di Kenya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data adalah tahapan yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan sumber data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diajukan. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka. Data yang dikumpulkan tidak diperoleh secara langsung dari sumber

data dan merupakan data yang bersifat sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan tidak dapat diukur secara statistik sistematis. Data kualitatif hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan dan memparkan suatu fenomena apa adanya tanpa memerlukan penelaahan secara matematis. Penulis menggunakan cara berpikir deduktif untuk menganalisa data, yaitu cara berpikir yang menjelaskan tentang sesuatu yang bersifat umum untuk menghasilkan prinsip yang lebih khusus.

Hasil dan Pembahasan

Konflik pasca pemilu 2007 yang terjadi di Kenya merupakan konflik internal. Konflik internal adalah konflik yang berlangsung di dalam negara atau konflik antara pemerintah pusat dengan sekelompok orang atau pihak tertentu yang lebih dipengaruhi oleh faktor internal daripada faktor eksternal.[6] Faktor pemicu terjadinya konflik pasca pemilu di Kenya ada tiga faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.

Sebab pemicu dalam konflik pasca pemilu 2007 di Kenya dari segi politik adalah adanya transisi politik di Kenya yang ditandai dengan pemilu, adanya persaingan kelompok yang semakin tajam dan pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam. Di Kenya, loyalitas etnis telah menjadi fitur pusat politik Kenya sejak kemerdekaan. Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwa masyarakat yang berbeda terus secara sadar atau tidak sadar mengandalkan etnisitas untuk mengekalkan dominasi mereka. Ketidaksetaraan etnis dalam Kenya dalam hal ekstraksi dan distribusi sumber daya langka telah menjadi sumber persaingan yang negatif antara mereka yang mengontrol kekuasaan dan orang-orang yang menganggap diri mereka telah terpinggirkan.

Daya tarik untuk memperoleh identitas yang nyata bagi suatu etnis yang merupakan dasar dari mobilitas politik berbasis etnis dan merupakan salah satu contoh praktek politik eksklusif. Hampir seluruh partai politik di Kenya memiliki basis utama yang berasal dari satu kelompok etnis tertentu. Hal tersebut dapat terlihat dari pelaku utama dalam pemilu 2007. PNU yang didominasi oleh Kikuyu, ODM yang mewakili tiga etnis utama, yaitu Luo, Kalenjin, dan Luhya.

Gejolak yang terjadi juga akibat terprovokasi oleh pihak tertentu, konflik antara dua tokoh dari etnis berbeda sering menggiring mereka pada permusuhan antarsesama. Pengendalian negara adalah inti untuk persaingan politik karena itu berarti akses terhadap sumber daya, dan agar elit etnis dapat tetap berkuasa. Secara umum dan historis, politisi telah dikaitkan dengan kekerasan pemilu yang memainkan peran sebagai penghasut. Politisi digunakan oleh partai politik untuk mobilisasi pendukung dan juga sebagai jalan untuk perekrutan 'tentara' yang sebagian besar telah digunakan sebagai pemicu kekerasan politik.

Hasutan politik oleh politisi dan tokoh masyarakat lainnya sebagian besar berkontribusi pada kekerasan pasca pemilu. Pernyataan para politisi dan penghasutan publik untuk membenci pihak antagonis, ditambah dengan

propaganda yang dilakukan melalui radio menjadi pemicu kekerasan, seperti halnya yang dilakukan oleh ODM. ODM memanfaatkan rasa frustrasi warga Kenya untuk mendapatkan dukungan, dengan mengingatkan mereka bahwa Kikuyu telah meraih segalanya, sementara semua kelompok etnis lain telah kehilangan segalanya, bahwa Mwai Kibaki telah mengkhianati janjinya untuk perubahan, serta kejahatan dan kekerasan yang tidak terkontrol.[7]

Kibaki dan Odinga secara aktif mencari suara dari luar etnis mereka, Kikuyu dan Luo. Kampanye presiden berpusat pada kinerja Kibaki. Kibaki mencoba memenangkan pemilih dengan mengangkat keberhasilannya dalam bidang pendidikan dan dengan *Vijana na Kibaki*" (gerakan pemuda untuk Kibaki), tetapi Odinga lebih sukses dengan mengangkat masalah pengangguran dan kemiskinan. [8] Karena banyak warga negara yang kurang antusias terhadap prestasi kerja pemerintahan Kibaki, Odinga memanfaatkan hal tersebut untuk mencari dukungan. Pada masa pemerintahan Kibaki, pemerintah cenderung untuk mengembangkan daerah dimana pemimpin berasal dan mengabaikan mereka yang dianggap kubu oposisi, membuat perebutan kekuasaan semakin besar. Rakyat yang juga berharap ada perubahan yang lebih baik dalam hidup mereka, mencoba untuk memberikan suara pada partai oposisi.

Penggunaan kekerasan oleh negara sebagai alat kontrol telah menjadi karakteristik yang tidak terpisahkan dari negara Kenya sejak masa kolonial. Kecenderungan dari berbagai pelaku politik untuk melakukan apapun, termasuk melakukan kekerasan, untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan politik. Setiap kali konflik meletus di Kenya, yang berdasarkan atas kekerasan pasca pemilu, kelompok-kelompok etnis tertentu yang dipilih menyerang kelompok lain yang tidak diinginkan.[9] Pada pemilu 2007, kekerasan dari pendukung ODM terhadap Kikuyu dan pendukung PNU lainnya sebagai reaksi dari sengketa hasil pemilu atas terpilihnya kembali Kibaki sebagai presiden.

Trasnisi politik yang menjadi sebab pemicu dalam konflik pasca pemilu 2007 di Kenya adalah dengan diadakannya pemilu. Sistem pemilu di Kenya didasarkan pada batas-batas wilayah kesukuan.[10] Batasan-batasan ini telah digunakan untuk mempermudah manipulasi semua lembaga publik, termasuk parlemen yang dipilih dari anggota partai. Semua partai politik yang dibentuk, menarik dukungan inti dari keluarga etnis pemimpin partai tersebut. Karena itu, persaingan dalam hal kekuasaan diatur oleh etnis.

Kompetisi untuk mendapat bagian dari kekuasaan negara naik dari waktu ke waktu. Pemilu 2007 merupakan kontes perebutan kekuasaan antara PNU yang dipimpin oleh Mwai Kibaki dengan ODM yang dipimpin oleh Raila Odinga. PNU yang dipimpin oleh Mwai Kibaki didominasi oleh etnis Kikuyu. Kikuyu merupakan mesin suara untuk Mwai Kibaki sebagai calon Presiden. Sedangkan ODM mewakili suku-suku yang terpinggirkan.

Persepsi masyarakat tentang lembaga pemerintah dan pejabat yang memihak presiden dan tidak memiliki integritas memperkuat dugaan bahwa pemilu tidak dilakukan dengan jujur dan adil. Hal tersebut dibuktikan dengan

didokumentasikannya secara luas di media dan dalam literatur bahwa proses pemilihan dan komposisi tim manajemen untuk pemilu 2007 adalah cacat dan sangat dimanipulasi.

Pengamat internasional dan domestik juga mengatakan bahwa penghitungan suara dalam pemilu 2007 adalah cacat. Hal tersebut terbukti dengan diumumkannya kembali Kibaki sebagai presiden pada tanggal 30 Desember 2007. Padahal dalam penghitungan suara sebelumnya, kubu oposisi Raila Odinga memenangi pemilu dengan keunggulan suara tipis. Hal tersebut menyebabkan para pendukung saingan Kibaki, Raila Odinga, terus mempersoalkan hasil pemilihan itu yang pada akhirnya memicu terjadinya kekerasan.

Penyebab pemicu konflik pasca pemilu 2007 di Kenya dari segi ekonomi adalah adanya masalah ekonomi yang semakin parah dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Dalam masyarakat di Kenya, terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara kaya dan miskin. Situasi kekacauan dan anarki sering terjadi sebagai bentuk keluhan mereka terhadap masalah ekonomi. Pengangguran, buta huruf, dan kemiskinan memotivasi para pemuda untuk melakukan kejahatan dan kekerasan. Partisipasi aktif kaum muda dapat dilihat dalam kekerasan Kenya pasca pemilu Desember 2007 sebagai refleksi dari kesenjangan sosial ekonomi.

Pemerintahan Kibaki telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada tahun 2007, namun pertumbuhan ekonomi tidak dapat meningkatkan pendapatan riil bagi warga Kenya yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.[11] Argumen pemerintah bahwa negara itu menikmati kemajuan ekonomi adalah sebuah fakta, tetapi masyarakat tidak melihat perubahan positif dalam hal kemiskinan. Persepsi publik bahwa para pemimpin politik jauh lebih tertarik pada kesejahteraan pribadi dan mengejar gaya hidup mewah, membuat ekonomi menjadi masalah rentan dalam memicu kekerasan pasca pemilu 2007.

Masalah peningkatan pertumbuhan populasi pemuda dan pengangguran, penduduk miskin, penduduk yang berpendidikan dan tidak berpendidikan yang setuju untuk bergabung dengan milisi dan geng terorganisir, juga menjadi salah satu penyebab kekerasan pasca pemilu 2007. Berdasarkan *Kenya National Buroe of Statistic* tingkat pertumbuhan penduduk Kenya telah berkurang menjadi 2,4%, namun Kenya masih memiliki dua juta pemuda yang menganggur. Masalah pengangguran dari pemuda yang berpendidikan terus berkembang. Tiap tahun, diperkirakan sekitar 40.000 pengangguran dari pemuda yang berpendidikan sedangkan hanya ada 150.000 pekerjaan di sektor formal yang telah dibuat sejak tahun 2003.[12]

Sedikitnya lapangan pekerjaan di sektor formal, membuat para pemuda pengangguran mencari pekerjaan di sektor informal. Banyak dari anak-anak yang tumbuh di jalanan dan terbiasa dengan kekerasan. Selain itu, meskipun banyak pemuda berbicara bahasa Inggris, mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut meningkatkan kemungkinan para pemuda untuk terlibat dalam kekerasan ketika mereka tidak dapat menemukan pekerjaan.

Tingginya tingkat pengangguran membuat para pemuda rentan terhadap mobilisasi dan manipulasi. Hal ini

dialami selama kekerasan pasca pemilu 2007, dimana partai politik menghasut para pemuda untuk berpartisipasi dalam konflik. Selama kekerasan pasca pemilu, banyak pemuda terlibat dalam demonstrasi dan kekerasan. Keinginan untuk perubahan oleh mayoritas pemuda menyebabkan keterlibatan aktif mereka dalam kekerasan pasca pemilu tersebut. Para pemuda yang berpartisipasi dalam konflik pasca pemilu karena status mereka sebagai pengangguran dan berada dalam keputusan. Kelompok-kelompok pemuda pengangguran juga mendapatkan uang tambahan karena mereka dibayar untuk terlibat dalam kekerasan pasca pemilu.[13]

Indikator penyebab pemicu konflik dari faktor sosial budaya adalah adanya sejarah kelompok yang bermasalah. Faktor ini merupakan salah satu penyebab utama dari kekerasan pasca pemilu Desember 2007 di Kenya. Reaksi dimulai dengan adanya penipuan terhadap hasil pemilu dan kemudian segera berubah menjadi kekerasan antar etnis karena adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang dirasakan, dan kesenjangan dalam alokasi sumber daya berdasarkan etnis. Masalah yang berhubungan dengan lahan adalah alasan bagi kekerasan pasca pemilu tahun 2007.

Kenya terdiri dari 42 kelompok etnis yang tinggal di delapan provinsi. Banyak daerah di luar kota-kota besar yang relatif homogen secara etnis. Masalah kesenjangan sering dilihat dari segi geografis etnis. Distribusi lahan di era kemerdekaan membuat etnis minoritas sangat kaya, sementara sebagian besar etnis lainnya berada dalam kemiskinan. Selama 48 tahun kemerdekaan Kenya, lebih banyak masalah yang muncul yang berkaitan dengan lahan dan tanpa ada penyelesaian yang memuaskan untuk menyelesaikan masalah lahan. Sejarah program penyelesaian lahan Kenya penuh intrik.

Perasaan di antara kelompok etnis tertentu mengenai marginalisasi sejarah, timbul dari adanya ketidakadilan yang dirasakan tentang alokasi lahan dan sumber daya nasional lainnya serta akses terhadap barang dan jasa publik. Keluhan tentang ketidakadilan historis tidak ditanggapi secara nyata oleh para politisi. Adanya fakta bahwa kelompok etnis yang memegang kekuasaan memiliki lebih banyak akses pada sumber daya negara daripada etnis lain, dapat menikmati pembangunan di daerahnya, mendapatkan pekerjaan yang layak untuk etnisnya dan berbagai macam manfaat lainnya. Hal ini yang mendasari ketegangan dan kebencian yang berpotensi kekerasan.

Secara umum suku-suku lain, menganggap bahwa suku Kikuyu telah menikmati lebih banyak sumber daya, baik itu sebelum ataupun sesudah merdeka, dan mengorbankan suku-suku lain. Beberapa komunitas etnis mendapatkan perlakuan lebih baik daripada etnis lain yang lebih miskin, sehingga etnis lain kurang berkembang dengan baik dan terpinggirkan.

Luo mengeluhkan marginalisasi sejarah oleh pemerintah. Karena peran mereka dalam politik yang selama periode pasca-kolonial mendapatkan pengabaian total dalam hal distribusi sumber daya nasional.[14] Sedangkan masyarakat Kalenjin berpendapat bahwa kekerasan pasca pemilu 2007 adalah bentuk dari kemarahan yang telah tersimpan lama atas pembagian lahan. Mereka berpendapat bahwa lahan tersebut tidak dibagi secara adil oleh

pemerintah kolonial dan diberikan pada Kikuyu dan kelompok lain, yang mereka pandang sebagai orang luar Kalenjin.[15]

Masyarakat Kalenjin menilai masyarakat Kikuyu tidak hanya serakah dan tidak bermoral, tetapi juga manipulatif dalam niat mereka untuk mendominasi lahan, perdagangan dan politik. Di bawah pemerintahan Presiden Kibaki, masyarakat Luo percaya bahwa mereka telah dirugikan.[16] Faktor ini sering menyebabkan kekerasan dan perasaan dendam antara kelompok etnis terutama Kalenjin dan Kikuyu.

Di Kenya, lahan merupakan masalah emosional, yang pada akhirnya berujung pada kekerasan. Kekerasan di Kenya memiliki siklus setiap 5 tahun sekali dengan pemilihan umum yang berfungsi sebagai inkubator. Selama bertahun-tahun, masalah lahan menjadi keluhan yang menonjol. Masalah lahan menjadi pemicu utama dalam kekerasan pemilu tahun 1990 hingga tahun 2002. Pada masa pemerintahan Kibaki, Kibaki gagal untuk mengatasi masalah tentang lahan. Hal tersebut berarti bahwa sekali lagi pada tahun 2007 masalah lahan yang belum terselesaikan menjadi agenda penyebab kekerasan pasca pemilu.[17]

Kesimpulan dan Saran

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pasca pemilu 2007 di Kenya, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Faktor politik yang menjadi pemicu konflik pasca pemilu 2007 adalah adanya persaingan antara dua partai besar, yaitu ODM dan PNU. Para elit politik yang berkompetisi dalam pemilu 2007 turut berkontribusi dalam menyebabkan kekerasan pasca pemilu 2007. Kibaki dan Odinga menghasut para pendukungnya yang berasal dari etnis tertentu dan menggunakannya sebagai "senjata" untuk memperoleh kekuasaan yang menyebabkan konflik tak dapat terelakkan.

Faktor ekonomi yang menyebabkan konflik pasca pemilu adalah adanya masalah ekonomi yang semakin parah. Banyaknya rakyat Kenya yang hidup dalam kemiskinan dan tingginya jumlah pengangguran membuat kekerasan semakin cepat meluas hampir di seluruh wilayah Kenya.

Faktor sosial budaya yang melatarbelakangi konflik pasca pemilu 2007 di Kenya adalah adanya sejarah kelompok yang bermasalah. Kenya yang terdiri dari 42 etnis juga mempunyai sejarah panjang tentang ketidakadilan. Ketidakpuasan etnis minoritas terhadap pemerintah yang terjadi karena diskriminasi di bidang pendidikan, alokasi lahan dan sumber daya nasional membuat kekerasan semakin mudah tersulut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan saran yang diberikan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Hary Yuswandi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Bapak Drs. Supriyadi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional sekaligus Dosen Pembimbing Utama; Bapak Dr. Puji Wahono, M.Si selaku

Dosen Pembimbing Anggota; Ibu Dra. Sri Yuniati sebagai ketua penguji. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Pemimpin Oposisi Kenya Tewas Ditembak dalam <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita/Pemimpin-Oposisi-Kenya-Tewas-Ditembak-1264.html> [11 Mei 2012]
- [2] Lingkaran Balas Dendam dalam <http://www.beritaindonesia.co.id/mananegara/lingkaran-balas-dendam/> [11 Mei 2012]
- [3], [4] The General Elections in Kenya, 2007 dalam http://www.ifra-nairobi.net/cahiers/Cahier_38.pdf [11 Mei 2012]
- [5] *Crisis in Kenya* dalam <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-kenya> [9 Mei 2012]
- [6] Yulius P. Hermawan. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- [7] KNCHR Reports. 2008. *On The Brink Of The Precipice: A Human Rights Account Of Kenya's Post-2007 Election Violence*. Hal 25
- [8] Gibson, CC, Long JD. 2009. *The presidential and parliamentary elections in Kenya December 2007*. Department of Political Science, University of California.
- [9] John O. Oucho. *Undercurrents of Post-Election Violence in Kenya: Issues in The Long-Term Agenda*. Hal 14
- [10] *Kenya Ethnicity Tribe State* dalam http://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/kenya_ethnicity_tribe_state [3 September 2012]
- [11] <http://globaledege.msu.edu/Countries/Kenya/economy> [13 Mei 2012]
- [12] International Labour Organization. 2009. *Key Indicators of the Labour Market, KILM 2009*, 6th Edition, Geneva
- [13], [14] Media Focus on Africa Foundation (MFAF). 2009. *National Integration and Cohesion: Desktop Research, Thematic Research & FGD Report*. Hal 23-24
- [15] *Post Election Report*. Hal 32
- [16] Media Focus on Africa Foundation (MFAF). 2009. *National Integration and Cohesion: Desktop Research, Thematic Research & FGD Report*. Hal 34
- [17] KNCHR Reports. 2008. *On The Brink Of The Precipice: A Human Rights Account Of Kenya's Post-2007 Election Violence*. Hal 17